

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) dalam Indriani, W (2016), menjelaskan bahwasanya teori keagenan (*agency*) adalah hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan kewenangan serta tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) guna melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk mengambil keputusan sesuai kepentingan *principal*. Dalam sektor pemerintahan, masyarakat selaku *principal* memberikan amanah kepada pemerintah selaku *agent*. Pemaparan Godfrey et al (2010) dalam Azizia (2016) mengindikasikan bahwa terjadinya pemisahan pengelolaan dan kepemilikan akan menyebabkan timbulnya konflik agensi. Konflik agensi kemudian mendorong manajemen atau pihak agen menyajikan informasi sesuai demi kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan prinsipalnya dalam hal ini *stakeholders*. *Agencyproblem* timbul akibat adanya biaya agensi atau *agency cost*.

Teori keagenan ini menjelaskan bahwa setiap agen memiliki kepentingan serta memiliki informasi yang lebih banyak dari *pricipal*. *Principal* sebagai pemberi mandat mempunyai hak untuk mendapatkan laporan mandat dari agen. Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi



amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam Masiyah (2010) pemerintah merupakan agen yang mendapat mandat dari principal. Masyarakat merupakan principal yang memberikan mandat ke agen (pemerintah). Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pertanggungjawaban keuangan dengan akuntabilitas kepada masyarakat.

### **2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)**

Menurut Bryson (2001), menyatakan bahwa stakeholder dapat sebagai individu, kelompok maupun suatu organisasi yang dapat melakukan klaim atau perhatian terhadap sumber daya atau hasil organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan dari stakeholder yang ada dalam perusahaan tersebut. Bryson (2001) menyatakan pula bahwa tidak semua stakeholder mendapatkan perhatian yang sama.

Untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi, maka perhatian diutamakan kepada stakeholder utama. Stakeholder utama menjadi penting karena yang akan mempengaruhi kinerja maupun penilaian kinerja dari suatu organisasi. Soesilo (2000), mengatakan : “... mereka yang paling utama harus diputuskan adalah siapa stakeholder utama kita. Bila kita tidak mengetahui, maka kita akan terombang ambing dalam kebingungan...”. Pernyataan tersebut benar adanya karena setiap *stakeholders* memiliki kepentingan yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda, bahkan bisa bertentangan antar kebutuhan dan kepentingan stakeholder.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak

terbatas pada masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Sesuai penjelasan peraturan pemerintah tersebut, sudah jelas siapa *stakeholder* utama dari suatu pemerintah meskipun laporan keuangan yang disajikan tidak hanya untuk golongan tertentu saja.

### **2.1.3 Pemerintah Daerah**

Keberadaan pemerintah daerah telah diatur sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam dan diperjelas dalam undang-undang. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Unsur laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas: dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana Desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### **2.1.4 Keterandalan**

Menurut PP 71 Tahun 2010 keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- d. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- e. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **2.1.5 Ketepatanwaktuan**

Menurut PP 71 Tahun 2010 ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

#### **2.1.6 Sumber Daya Manusia**

Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Aditya (2015), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi,



dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggungjawab seseorang dapat dilihat dari posisi jabatan seseorang. Jabatan tersebut berpengaruh kepada besar atau kecilnya tanggungjawab seseorang. Dalam menjalankan tanggungjawab diperlukan deskripsi yang jelas pada tanggungjawab tersebut. deskripsi yang tidak jelas dapat menyulitkan seseorang dalam menjalankan tanggungjawab.

Menurut Havesi (2005) dalam Aditya (2015), menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Menurut Griffin (2004) menyatakan bahwa ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman. Pendidikan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan nonformal. Pelatihan memiliki beberapa indikator yaitu: menetapkan sasaran yang jelas dan terukur, menggunakan metode pelatihan yang tepat, mempersiapkan materi pelatihan yang mudah dipahami, pelatihan memberikan keuntungan, pelatihan diberikan oleh tenaga ahli, materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemakai, materi pelatihan disiapkan dengan baik. Pengalaman dibutuhkan spesifikasi kerja yang jelas dan prestasi yang didapatkan. Menurut Annisa (2014) menyatakan bahwasanya kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan, yang mana keterandalan dan ketepatanwaktuan harus selalu ditingkatkan sebagai laporan



keuangan yang benar jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung pertimbangan Yusuf (2016) sangat berpengaruh signifikan.

### 2.1.7 Teknologi Informasi

Teknologi Informasi menurut ITTA (Information Technology Association of America) yaitu suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi di era saat ini akan membantu kinerja dari suatu kegiatan. Begitu juga membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang memiliki nilai informasi baik.

Menurut Mulyanto (2009:43) pada Yusuf (2016) teknologi informasi merupakan perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologitelekomunikasi. Maka diharapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu persoalan pembuat keputusan yang efektif serta dapat menyaring dan meringkas informasi yang baik dan benar sehingga dapat menghindari kelebihan informasi.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Aditya (2015)). Teknologi informasi dengan perangkat keras dan lunak diharapkan dapat menyelesaikan masalah serta dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Efisien dinilai dari bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan dapat tepat waktu. Efektif dinilai dari bagaimana hasil dari penggunaan teknologi informasi dapat diandalkan sesuai penggunaannya.

Pemanfaatan teknologi pada penyajian laporan keuangan yang dilakukan pemerintah diwajibkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005. Informasi keuangan pada pemerintah daerah diatur secara nasional oleh kementerian keuangan. Informasi keuangan ini memiliki fungsi yaitu: penyusunan standar informasi keuangan daerah, penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat, penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi, penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi, penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan sistem informasi keuangan daerah, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD, pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah. Sehingga, teknologi informasi memiliki tujuan agar laporan keuangan yang disajikan memiliki nilai informasi yang baik yaitu ketepatanwaktuan dan keterandalan untuk dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Teknologi informasi dapat digunakan secara maksimal apabila sumber daya manusia yang mengoperasikan memiliki kapasitas yang memadai. Ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang memadai serta pemanfaatan teknologi yang baik akan meningkatkan nilai informasi pada laporan keuangan pemerintah sehingga dalam penyampaiannya dapat memiliki ketepatanwaktuan serta dapat diandalkan. Alasan tersebut didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosalin (2011), serta Nurillah (2014). Akan tetapi Annisa (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh sama sekali terhadap ketepatanwaktuan dan keterandalan dalam laporan keuangan.

### 2.1.8 Sistem Pengendalian Intern

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Tujuan dari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tersebut agar dapat mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga kepala suatu daerah dan satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selain itu, tujuan lain adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2009:180) pada Saleh (2016) bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajer dan personellain yang didesain untuk memberikan keyakinan

memadai tentang pencapaian tigagolongan yaitu (i) keandalan pelaporan keuangan, (ii) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (iii) efektifitas dan efisiensi operasi. Menurut Aditya (2015) dan Annisa (2014) bahwasanya Sistem Pengendalian Intern sangat berpengaruh terhadap keandalan dalam laporan keuangan, sedangkan menurut Karmila dan Amries (2014) tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Maka perlu ditingkatkannya kinerja pengendalian intern yang baik untuk tepatwaktu dalam pelaporan keuangannya, Annisa (2014).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Aditya R (2015) Nurillah (2014), Muhammad Saleh dan Ventje Illiat (2012), dan Annisa R (2014). Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan adalah hasil dari ketepatanwaktuan dan keterandalan, serta wilayah atau objek penelitian yang berbeda. Ringkasan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Judul Penelitian dan Tahun</b>	<b>Variabel dan Metodologi</b>	<b>Hasil</b>
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Good Governance Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan	<b>Variabel Bebas :</b> Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Good Governance	Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian interen akuntansi, dan <i>Good Corporate Governance</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan

<p>Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi) Aditya Rachman (2015)</p>	<p><b>Variabel Terikat :</b> Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan</p> <p><b>Metodelogi :</b> Analisis Regresi Berganda</p>	<p>keuangan pemerintah khususnya pada 32 Satker di Polda Jambi. Pengaruh secara parsial keterandalan laporan keuangan :</p> <p>a. Kapasitas SDM tidak berpengaruh positif signifikan b. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan c. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan d. <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan</p> <p>4. Pengaruh secara parsial ketepatanwaktuan laporan keuangan:</p> <p>a. Kapasitas SDM berpengaruh positif signifikan b. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan c. <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan</p>
<p>Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Pemerintah Kota Depok) Nurillah (2014)</p>	<p><b>Variabel Bebas :</b> kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi</p> <p><b>Variabel Terikat :</b> kualitas pelaporan keuangan</p> <p><b>Metodelogi :</b> Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan Penerapan standar akuntansi keuangan berpengaruh positif signifikan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan.</p>
<p>Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi</p>	<p><b>Variabel Bebas :</b> Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan</p>	<p>Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan Sistem Pengendalian Intern</p>

<p>Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara Muhammad Saleh dan Ventje Illiat (2012)</p>	<p>Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern</p> <p><b>Variabel Terikat :</b> Keandalan Pelaporan Keuangan</p> <p><b>Metodelogi :</b> Analisis Regresi Berganda</p>	<p>tidak berpengaruh signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan</p> <p>Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan.</p>
<p>Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali) Annisa Rachmawati (2014)</p>	<p><b>Variabel Bebas :</b> Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi</p> <p><b>Variabel Terikat:</b> Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan</p> <p><b>Metodelogi :</b> Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Kompetensi sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan, begitu sebaliknya. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan.</p>

*Sumber: Berbagai Penelitian Ilmiah (2015)*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan kegiatan pemerintah yaitu bisa dengan laporan keuangan. Laporan keuangan akan menggambarkan kegiatan pemerintah yang telah lalu, sedang berlangsung maupun rencana di masa mendatang. Pemangku kepentingan sangat membutuhkan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Laporan keuangan tersebut dapat sebagai dasar untuk membuat keputusan. Sehingga untuk dapat mendukung pengambilan keputusan,



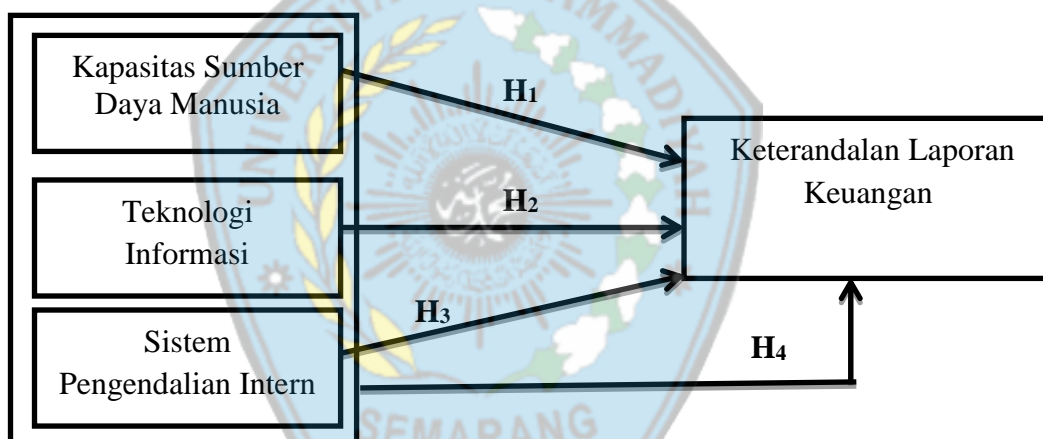
laporan keuangan yang disajikan pemerintah harus yang baik di dalamnya. Laporan yang baik dapat tercapai dengan indikator bahwa laporan keuangan tersebut dapat diandalkan atau memiliki keterandalan untuk pemangku kepentingan mendapatkan informasi. Selain itu, laporan keuangan tersebut memiliki atau disajikan secara tepat waktu. Ketepatanwaktuan dalam penyajian laporan keuangan tentu akan memudahkan dan mempercepat pemangku kepentingan mendapatkan informasi untuk pembahasan pembuatan keputusan.

Pemerintah telah mengatur dengan berbagai peraturan pemerintah maupun undang-undang agar terciptanya laporan keuangan pemerintah yang memiliki akuntabilitas dan nilai informasi yang baik bagi setiap pemangku kepentingan. Peraturan yang mengatur tentang pemerintah daerah beserta pengelolaannya termuat pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014. Peraturan terkait standar akuntansi pemerintah telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Kewajiban dalam penggunaan teknologi informasi pada pelaporan keuangan pemerintah juga telah diatur oleh pemerintah pada peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan pemerintah yang memiliki akuntabilitas, transparan, efektif, efisien, dan memiliki nilai informasi yang baik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern pemerintah juga telah diatur sesuai langkah-langkah yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut termaktub pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.

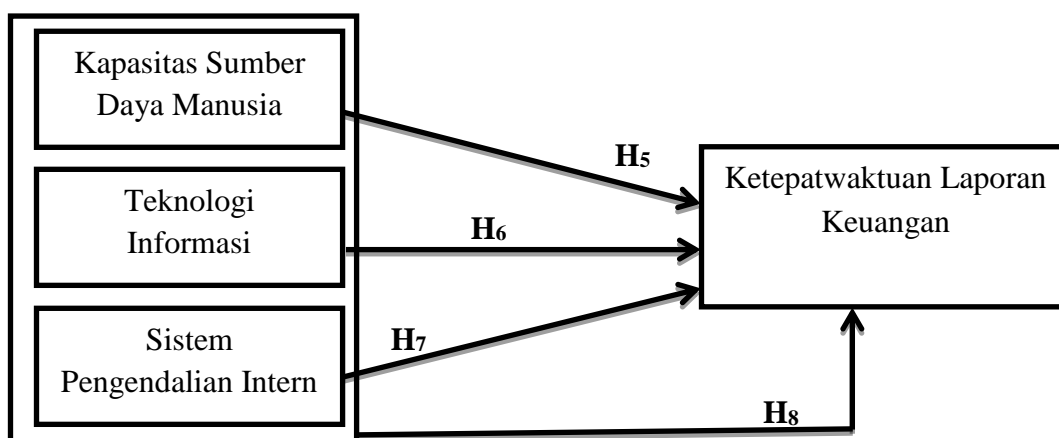


Nilai informasi yang baik pada laporan keuangan dapat dilihat dengan keterandalan laporan keuangan tersebut dan ketepatanwaktuan dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan bisa disebut baik dengan cara didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Uraian diatas kemudian diringkas dalam kerangka pemikiran seperti pada dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Model I**



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran Model II**



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam menyajikan laporan keuangan akan berdampak pada laporan keuangan yang tidak sesuai atau tidak patuh sesuai dengan peraturan pemerintah yang termaktub peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Maka dengan meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, dapat menjamin kualitas keterandalan laporan keuangan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2016) dan Nurillah (2014) mendapatkan hasil positif signifikan, karena telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang akuntansi. Hal ini dikarenakan banyaknya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pegawai yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan bendahara, pelatihan SIMDA keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.*

#### **2.4.2 Pengaruh Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan**

Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam perekayasaan sebagian besar proses bisnis. Kecepatan, kemampuan pemrosesan informasi, dan konektivitas komputer serta teknologi internet dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. (Yusuf, 2016). Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Maka dengan memanfaatkan teknologi informasi, dapat membuat efisiensi laporan keuangan yang andal.

Penelitian yang dilakukan Aditya (2015) dan Nurillah (2014), menemukan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.*

### **2.4.3 Pengaruh Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Keterandalan Laporan Keuangan**

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Dengan adanya pengendalian internal yang mengatur, mengendalikan, dan mengontrol pembuatan penyajian laporan keuangan maka laporan keuangan dapat diandalkan.

Penelitian yang dilakukan Aditya (2015) dan Nurillah (2014) menemukan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.*

### **2.4.4 Hubungan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Intern Secara Bersama Berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan.**

Pemerintah telah mengatur dengan berbagai peraturan pemerintah agar terciptanya laporan keuangan pemerintah yang baik bagi setiap pemangku kepentingan. Peraturan yang mengatur tentang pemerintah daerah beserta pengelolaannya termuat pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014.

Peraturan terkait standar akuntansi pemerintah telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Kewajiban dalam penggunaan teknologi informasi pada pelaporan keuangan pemerintah diatur peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem keuangan daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern pemerintah telah diatur sesuai langkah-langkah pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan dilakukannya pengontrolan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern secara baik, maka dapat menjamin kualitas keterandalan laporan keuangan tersebut.

Sesuai penelitian yang telah dilakukan oleh Aditya (2015) dan Annisa (2016), adanya hubungan positif signifikan, berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>4</sub>: Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.*

#### **2.4.5 Pengaruh Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan. Kapasitas sumber daya yang minim pada suatu organisasi akan membuat keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Tentu, akan mempersulit dalam

menyelesaikan tugas karena pemahamannya yang kurang. Melakukan control yang baik pada SDM, dapat menjadikan laporan keuangan yang tepat waktu.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2015) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas, maka hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>5</sub>: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan.*

#### **2.4.6 Pengaruh Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Penggunaan teknologi informasi dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Penggunaan teknologi informasi telah diwajibkan pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Pada peraturan tersebut mengatur penyusunan standar informasi keuangan daerah, penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat, penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi, penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD, pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah. Maka dengan terciptanya prosedur diatas, bisa menjadikan laporan keuangan yang tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan Aditya (2015) dan Nurillah (2014), menemukan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, serta output lainnya lebih tepat waktu.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka hipotesis keenam dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>6</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.*

#### **2.4.7 Pengaruh Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Ketepatan Waktu Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian intern pemerintah telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Tujuan dari peraturan tersebut agar dapat mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga kepala suatu daerah dan satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tujuan lain adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan prinsip ketepatan waktu. Melakukan pengendalian intern yang efisien dan efektif dapat membuat laporan keuangan yang tepat waktu.



Penelitian yang dilakukan Aditya (2015), Nurillah (2014), dan Annisa (2014) menemukan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka hipotesis ketujuh dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H7: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.*

#### **2.4.8 Hubungan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Intern Secara Bersama Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan.**

Peraturan yang mengatur tentang pemerintah daerah beserta pengelolaannya termuat pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014. Peraturan terkait standar akuntansi pemerintah telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Kewajiban dalam penggunaan teknologi informasi pada pelaporan keuangan pemerintah diatur peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem keuangan daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern pemerintah telah diatur sesuai langkah-langkah pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Maka dengan cara mengikuti langkah-langkah yang telah diatur akan menjamin laporan keuangan yang tepat waktu dalam pelaporannya.

Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan, maka pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama. Sesuai penelitian yang telah dilakukan oleh Aditya (2015) dan Annisa (2014),

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka hipotesis kedelapan dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>8</sub>: Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.*

